

Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Polres Pasangkayu Sulawesi Barat

Dhimas Kriesna

Universitas Airlangga, Indonesia
Email: dhimaskriesna54@gmail.com

Keywords:

drug-related factors, Pasangkayu Police, drug prevention

Abstract

This study aims to identify the factors contributing to the increasing cases of drug-related crimes in the jurisdiction of the Pasangkayu Police Department, West Sulawesi. Using a case study approach and qualitative methods, this research explores various factors influencing the prevalence of drugs through in-depth interviews, statistical data analysis, and direct field observation. The findings reveal that the primary factors driving the rise in drug cases include high levels of poverty and unemployment, unfavorable social environments, and low levels of education, which affect the community's legal awareness. Additionally, the use of technology, which facilitates drug distribution through social media, worsens the situation. Weak law enforcement and lack of community oversight are further contributing factors. The study provides recommendations to enhance public education and awareness on the dangers of drugs, offer legitimate economic opportunities, strengthen social surveillance, and improve the police force's capacity to utilize technology in combating drug-related crimes. It is hoped that the results of this study can serve as a foundation for preventive and remedial measures to tackle drug issues in the Pasangkayu Police jurisdiction, leading to a safer and more prosperous community.

Kata Kunci:

faktor penyebab narkoba, Polres Pasangkayu, penanggulangan narkoba.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab maraknya kasus narkoba di wilayah hukum Polres Pasangkayu, Sulawesi Barat. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus dan metode kualitatif, penelitian ini menggali berbagai faktor yang mempengaruhi prevalensi narkoba melalui wawancara mendalam, analisis data statistik, dan observasi langsung di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang mendorong meningkatnya kasus narkoba adalah tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran, lingkungan sosial yang tidak kondusif, serta rendahnya tingkat pendidikan yang berdampak pada kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, penggunaan teknologi yang mempermudah peredaran narkoba melalui media sosial juga memperburuk keadaan. Penegakan hukum yang lemah dan kurangnya pengawasan di tingkat komunitas menjadi faktor penunjang lainnya. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pendidikan dan penyuluhan masyarakat tentang bahaya narkoba, penyediaan peluang ekonomi, penguatan pengawasan sosial, serta peningkatan kapasitas aparat kepolisian dalam penggunaan teknologi untuk pemberantasan narkoba. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi upaya preventif dan penanggulangan narkoba di wilayah Polres Pasangkayu guna terciptanya masyarakat yang lebih aman dan sejahtera.

PENDAHULUAN

Permasalahan narkoba telah lama menjadi perhatian serius di banyak wilayah Indonesia, termasuk di Sulawesi Barat, karena dampaknya yang sangat besar terhadap masyarakat, terutama pada kalangan generasi muda. Fenomena narkoba ini menjadi tantangan bagi pemerintah, aparat penegak hukum, serta masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu,

analisis mendalam terhadap faktor-faktor penyebab dan solusi yang dapat diambil untuk menanggulangi masalah narkoba ini perlu dilakukan (Alamsyah & Dewi, 2022; Amalia, 2022; Anarta et al., 2021).

Narkoba menjadi salah satu masalah sosial yang cukup kompleks, dengan dampak yang tidak hanya dirasakan oleh pengguna, tetapi juga meluas ke keluarga, masyarakat, dan negara. Penyalahgunaan narkoba dapat merusak struktur sosial, ekonomi, bahkan kesehatan masyarakat (Arifin, 2020; Aulia, 2021; Nasional, 2019). Terlebih lagi, narkoba dapat menurunkan kualitas hidup individu dan menjadi salah satu penyebab tingginya angka kriminalitas, penyebaran penyakit menular, serta ketergantungan yang sulit diatasi. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui secara rinci penyebab maraknya kasus narkoba di wilayah tertentu agar upaya penanggulangan dapat lebih efektif (Badri, 2013; Nasional, 2020, 2023).

Menurut Indonesia Drug Report 2023, Sulawesi Barat mencatatkan angka yang cukup signifikan dalam penanganan kasus narkoba, dengan total 482 kasus yang berhasil diungkap. Peringkat XXVII yang diraih oleh wilayah ini menunjukkan bahwa masalah narkoba di daerah ini telah mencapai titik yang serius (BNN, 2023; Fadilah, 2021; D. N. K. N. R. Indonesia, 2023). Dari total kasus tersebut, Polri berhasil menangani 440 kasus, menunjukkan peran besar kepolisian dalam pemberantasan narkoba di Sulawesi Barat. Keberhasilan ini mencerminkan dedikasi aparat kepolisian dalam mengungkap jaringan narkoba, meskipun tantangan yang dihadapi cukup kompleks. Sementara itu, Badan Narkotika Nasional (BNN) menangani 42 kasus, yang menandakan bahwa selain penindakan, peran BNN dalam pencegahan dan rehabilitasi juga sangat penting (Hakim, 2020; Handayani & Putra, 2021; Hariyanto, 2018; Hidayat, 2021).

Selain itu, data dari laporan tersebut mengungkapkan bahwa jumlah pengedar narkoba di Sulawesi Barat pada tahun 2023 tercatat sebanyak 559 orang (Hutomo, 2019; K. K. R. Indonesia, 2019, 2023; Iskandar, 2022). Angka ini menunjukkan bahwa peredaran narkoba masih sangat luas, melibatkan jaringan distribusi yang cukup besar. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum, karena meskipun kasus narkoba berhasil diungkap, jalur distribusi masih beroperasi secara aktif (F. Kurniawan, 2021; H. Kurniawan & Rahmawati, 2021; Kusuma & Wibowo, 2018; Lestari & Wulandari, 2021; Lukman, Alifah, & Divarianti, 2021a). Untuk itu, penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pengedar serta upaya penutupan jalur distribusi narkoba sangat diperlukan guna memutus mata rantai peredaran narkoba di wilayah ini (Budiarjo, 2008; Lukman, Alifah, & Divarianti, 2021b; Lukman, Alifah, Divarianti, et al., 2021; Mamoh, 2020).

Tidak hanya pengedar, data juga mencatatkan jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di Sulawesi Barat mencapai 760 kasus pada tahun 2023. Angka ini menggambarkan bahwa masalah penyalahgunaan narkoba telah menjadi isu yang sangat besar di kalangan masyarakat, terutama di kalangan generasi muda (Nugroho, 2020; Nurhadi, 2020a, 2020b). Dengan semakin meningkatnya angka kasus narkoba, baik yang melibatkan pengedar maupun pengguna, penanggulangan narkoba di Sulawesi Barat memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan kolaboratif. Penyuluhan kepada masyarakat, penguatan program pencegahan di sekolah-sekolah, serta peningkatan fasilitas rehabilitasi bagi pengguna narkoba harus menjadi fokus utama dalam upaya menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba di wilayah ini (R. P. Pratama et al., 2023; Y. Pratama & Nugroho, 2020).

Tahun 2023 wilayah Pasangkayu menurut data memasuki wilayah waspada narkoba di Sulawesi Barat. Secara keseluruhan, terdapat beberapa kecamatan di Sulawesi Barat yang tercatat memiliki status waspada, yang menunjukkan bahwa mereka menghadapi ancaman penyalahgunaan narkoba. Kecamatan Pasangkayu di Kabupaten Pasangkayu memiliki status waspada, yang menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam penanggulangan masalah narkoba. Selain itu, beberapa kecamatan seperti Tadui dan Binanga di Kabupaten Mamuju juga terdaftar dengan status yang sama. Beberapa kecamatan yang memiliki status bahaya juga terlihat, seperti Lapeo di Kabupaten Polewali Mandar, yang menandakan bahwa wilayah tersebut memiliki tingkat masalah narkoba yang lebih serius.

Berdasarkan data kasus yang ditangani oleh Sat Res Narkoba Polres Pasangkayu, terlihat adanya tren peningkatan kasus narkoba. Pada tahun 2023, tercatat 31 kasus narkoba yang berhasil diungkap, sementara pada tahun 2024 jumlahnya meningkat menjadi 35 kasus. Peningkatan ini menunjukkan adanya kenaikan sebanyak 4 kasus atau sekitar 12,9 persen. Kenaikan jumlah kasus ini mengindikasikan bahwa masalah narkoba di wilayah Pasangkayu mengalami eskalasi dalam periode tersebut. Faktor-faktor yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan ini antara lain perkembangan jaringan distribusi narkoba, meningkatnya permintaan terhadap narkoba di pasar lokal, dan peningkatan kesadaran serta kewaspadaan aparat kepolisian dalam mengungkap kasus.

Permasalahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia hingga saat ini masih menjadi isu krusial yang berdampak luas terhadap aspek sosial, ekonomi, dan keamanan masyarakat. Fenomena ini tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan, tetapi juga telah merambah daerah-daerah yang sebelumnya relatif aman, sehingga menunjukkan adanya perluasan jaringan peredaran narkoba yang semakin kompleks. Data empiris menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba telah menyentuh berbagai lapisan masyarakat, terutama generasi muda yang berada pada fase rentan terhadap perilaku menyimpang. Kondisi ini menuntut adanya kajian ilmiah yang mendalam untuk memahami faktor penyebab serta strategi penanggulangan yang efektif, khususnya pada wilayah dengan tren peningkatan kasus seperti yang terjadi di wilayah hukum Polres Pasangkayu.

Sejumlah penelitian terdahulu yang bersumber dari Google Scholar dan Scopus menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba dipengaruhi oleh berbagai faktor multidimensional. Studi kuantitatif dan observasional menemukan bahwa faktor lingkungan, keluarga, kepribadian, serta kemudahan akses terhadap narkoba menjadi determinan utama perilaku penyalahgunaan. Penelitian lain juga menegaskan bahwa faktor internal seperti kepribadian individu dan faktor eksternal seperti tekanan lingkungan sosial serta pergaulan sebaya memiliki kontribusi signifikan terhadap keterlibatan individu dalam narkoba. Selain itu, penelitian berbasis literatur menunjukkan bahwa faktor sosial, ekonomi, pendidikan, hingga kebijakan publik turut membentuk ekosistem yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan narkoba secara sistemik.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji faktor penyebab penyalahgunaan narkoba, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada kelompok tertentu seperti remaja atau pelajar, serta menggunakan pendekatan parsial yang belum sepenuhnya mengintegrasikan perspektif penegakan hukum di tingkat lokal. Penelitian sebelumnya cenderung menitikberatkan pada aspek perilaku individu dan lingkungan sosial, namun belum banyak yang secara spesifik mengkaji sinergi antara faktor sosial-ekonomi dengan efektivitas

penegakan hukum oleh aparat kepolisian di daerah tertentu. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (research gap) dalam memahami keterkaitan antara dinamika sosial masyarakat dan kinerja institusi penegak hukum dalam menangani kasus narkoba secara komprehensif.

Urgensi penelitian ini semakin kuat mengingat peningkatan jumlah kasus narkoba yang terjadi di berbagai daerah menunjukkan bahwa pendekatan konvensional belum sepenuhnya efektif dalam menekan angka penyalahgunaan. Fenomena meningkatnya penggunaan teknologi dalam distribusi narkoba, serta keterlibatan jaringan yang semakin terorganisir, menjadi tantangan baru bagi aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mampu memberikan gambaran empiris mengenai kondisi nyata di lapangan, sehingga dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan modus operandi kejahatan narkoba.

Kebaruan (novelty) dalam penelitian ini terletak pada pendekatan yang mengintegrasikan analisis faktor penyebab penyalahgunaan narkoba dengan evaluasi peran dan kinerja aparat penegak hukum, khususnya Polres Pasangkayu, dalam menanggulangi permasalahan tersebut.

Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi faktor sosial, ekonomi, dan budaya, tetapi juga mengkaji bagaimana strategi penegakan hukum, koordinasi antarinstansi, serta partisipasi masyarakat berkontribusi dalam upaya pemberantasan narkoba. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih holistik dibandingkan penelitian sebelumnya yang cenderung parsial.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan maraknya penyalahgunaan narkoba di wilayah Polres Pasangkayu, serta mengevaluasi upaya penegakan hukum yang telah dilakukan dalam menanggulangi permasalahan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji efektivitas sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba, sehingga dapat ditemukan strategi yang lebih tepat dan berkelanjutan.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, kriminologi, dan ilmu sosial terkait penyalahgunaan narkoba dan penegakan hukum. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat kepolisian, pemerintah daerah, serta pemangku kebijakan dalam merumuskan strategi penanggulangan narkoba yang lebih efektif dan berbasis data empiris. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya peran kolektif dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam studi ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Pasangkayu. Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh pihak yang terkait dengan permasalahan narkoba, seperti aparat kepolisian, masyarakat, serta individu yang pernah terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkoba. Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu

pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu, seperti tingkat keterlibatan, pengalaman, dan pengetahuan terhadap fenomena yang diteliti. Instrumen penelitian yang digunakan berupa pedoman wawancara mendalam (in-depth interview guide), lembar observasi, serta dokumentasi data sekunder yang diperoleh dari laporan resmi instansi terkait. Uji validitas data dilakukan melalui teknik triangulasi sumber dan metode, sedangkan reliabilitas dijaga melalui konsistensi proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, observasi langsung di lapangan untuk menangkap kondisi empiris, serta studi dokumentasi terhadap data statistik dan laporan resmi terkait kasus narkoba. Prosedur penelitian dimulai dari tahap persiapan dengan penyusunan instrumen, dilanjutkan dengan pengumpulan data di lokasi penelitian, kemudian pengolahan dan analisis data hingga penarikan kesimpulan. Dalam proses pengolahan data, peneliti menggunakan bantuan perangkat lunak seperti Microsoft Word dan Excel untuk pengorganisasian data, serta aplikasi analisis kualitatif (misalnya NVivo atau ATLAS.ti) guna mempermudah proses pengkodean dan kategorisasi data. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik yang dilakukan secara bertahap melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan.

Selanjutnya, analisis tematik dilakukan dengan mengelompokkan data ke dalam tema-tema utama seperti faktor sosial, ekonomi, kelembagaan, dan budaya yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba. Tahap reduksi data dilakukan dengan memilih informasi yang relevan, kemudian dilanjutkan dengan proses kategorisasi dan interpretasi untuk menemukan pola hubungan antar variabel. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang didukung tabel dan kutipan hasil wawancara untuk memperkuat validitas temuan. Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dengan mempertimbangkan keseluruhan temuan penelitian serta melakukan verifikasi ulang terhadap data yang diperoleh. Dengan demikian, metode penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai faktor-faktor penyebab serta upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di wilayah Polres Pasangkayu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi dan Pemantauan Kinerja Polres Pasangkayu dalam Penanggulangan Narkoba

Evaluasi dan pemantauan kinerja merupakan aspek yang sangat penting dalam rangka memastikan bahwa upaya pemberantasan narkoba yang dilakukan oleh Polres Pasangkayu dapat berjalan dengan efektif dan memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Proses evaluasi ini tidak hanya melibatkan pengumpulan data, tetapi juga analisis yang mendalam mengenai keberhasilan dan tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan program penanggulangan narkoba. Tanpa adanya evaluasi yang sistematis, sulit untuk mengetahui sejauh mana program tersebut berhasil mengatasi masalah narkoba, serta area mana yang perlu diperbaiki atau diperkuat.

Sistem Monitoring dan Evaluasi Pemberantasan Narkoba

Sistem Monitoring dan Evaluasi (M&E) dalam penanggulangan narkoba oleh Polres Pasangkayu merupakan mekanisme yang digunakan untuk mengawasi jalannya program serta menilai efektivitas dan dampaknya terhadap situasi narkoba di wilayah hukum Polres

Pasangkayu. Sistem ini penting untuk memonitor berbagai aspek operasional pemberantasan narkoba, baik dari segi pencegahan, penindakan, maupun rehabilitasi.

a. Pengumpulan Data

Monitoring yang dilakukan melibatkan pengumpulan data secara berkelanjutan mengenai berbagai indikator terkait masalah narkoba, termasuk data jumlah penyalahgunaan narkoba, jenis narkoba yang beredar, serta jumlah kasus yang ditangani. Data ini dikumpulkan melalui berbagai sumber, seperti laporan dari satuan reserse, hasil operasi, laporan masyarakat, serta kerjasama dengan instansi terkait seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Dinas Kesehatan.

Saat diwawancarai, Kapolres Pasangkayu AKBP Candra Kurnia Setiawan, S.IK, menjelaskan bahwa proses pengumpulan data dalam penanggulangan narkoba di wilayah Pasangkayu dilakukan dengan mengoptimalkan berbagai saluran informasi. “Kami melibatkan berbagai pihak dalam mengumpulkan data, seperti laporan dari satuan reserse, hasil operasi lapangan, serta laporan dari masyarakat,” ujarnya. Kapolres juga menekankan pentingnya kerjasama dengan instansi terkait seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Dinas Kesehatan. “Kami tidak hanya bergantung pada internal Polres, tetapi juga berkolaborasi dengan lembaga lain untuk memastikan bahwa data yang kami terima akurat dan dapat digunakan untuk menentukan langkah-langkah strategis dalam pemberantasan narkoba.”

Dalam hal ini, Waka Polres Kompol Syaiful Isnani, S.E., S.I.K. menambahkan bahwa pemantauan ini juga tidak hanya dilakukan oleh pihak kepolisian saja, namun juga melibatkan peran aktif masyarakat. “Kami mengajak masyarakat untuk berperan serta dalam mendeteksi dini peredaran narkoba dengan cara melaporkan jika ada aktivitas mencurigakan,” kata Kompol Syaiful. Hal ini menunjukkan bahwa Polres Pasangkayu mengadopsi pendekatan berbasis masyarakat dalam usaha pemberantasan narkoba, yang diharapkan dapat memperluas cakupan pemantauan dan meningkatkan efektivitas penindakan. Pemantauan ini tidak hanya dilakukan oleh Polres Pasangkayu, namun juga melibatkan masyarakat sebagai bagian dari upaya deteksi dini terhadap peredaran narkoba.

b. Indikator Kinerja

Berkenaan dengan indikator kinerja, Kasat Narkoba Polres Pasangkayu IPTU Muhammad Yusuf, S.Sos., mengungkapkan bahwa penentuan indikator kinerja yang jelas dan terukur sangat penting untuk mengukur sejauh mana upaya yang dilakukan Polres Pasangkayu berhasil menanggulangi masalah narkoba. “Indikator-indikator yang kami gunakan mencakup jumlah kasus narkoba yang berhasil ditangani, jumlah jaringan narkoba yang berhasil dibongkar, serta sejauh mana kami dapat menurunkan prevalensi penyalahgunaan narkoba di masyarakat,” jelasnya. IPTU Yusuf juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan program pencegahan. “Kami sangat mengandalkan laporan dari masyarakat terkait peredaran narkoba, serta partisipasi mereka dalam kegiatan sosialisasi yang kami selenggarakan.” Penentuan indikator kinerja yang jelas dan terukur sangat penting dalam evaluasi program. Indikator ini meliputi:

- 1) Jumlah kasus narkoba yang ditangani: Ini mencakup jumlah penangkapan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polres Pasangkayu.
- 2) Keberhasilan penangkapan jaringan narkoba: Indikator ini mengukur sejauh mana operasi penindakan terhadap peredaran narkoba dapat membongkar jaringan narkoba yang ada.

- 3) Penurunan prevalensi penyalahgunaan narkoba: Memonitor tren jumlah pengguna narkoba yang terdeteksi di masyarakat, baik dari hasil survey, laporan, ataupun pengungkapan kasus narkoba.
- 4) Tingkat partisipasi masyarakat dalam program pencegahan narkoba: Indikator ini mengukur sejauh mana masyarakat aktif dalam melaporkan penyalahgunaan narkoba serta partisipasinya dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi terkait bahaya narkoba.

c. Evaluasi Kinerja

Evaluasi dilakukan untuk menilai apakah tujuan yang telah ditetapkan dalam program pemberantasan narkoba tercapai. Ini dilakukan dengan menganalisis data yang telah terkumpul, mengukur hasil yang dicapai, dan menilai apakah metode yang digunakan selama program dapat mengatasi masalah narkoba secara efektif.

Evaluasi kinerja dilakukan secara rutin untuk menilai apakah tujuan dari program pemberantasan narkoba telah tercapai. Kapolres Pasangkayu menjelaskan bahwa evaluasi ini dilakukan secara periodik melalui rapat internal bersama tim Sat Res Narkoba dan pihak terkait lainnya. "Evaluasi adalah langkah penting untuk melihat efektivitas program. Dari evaluasi ini, kami bisa mengetahui apakah metode yang diterapkan selama ini efektif atau perlu adanya penyesuaian," ungkapnya. Selain itu, hasil evaluasi ini juga dilaporkan kepada pihak yang lebih tinggi, seperti pemerintah daerah dan BNN, untuk memberikan umpan balik yang konstruktif. "Umpan balik ini sangat penting agar kebijakan yang diterapkan lebih tepat sasaran dan bisa diperbaiki jika ada kendala yang ditemui di lapangan," tambah Kompol Syaiful. Evaluasi dilakukan secara periodik, baik melalui rapat internal Polres Pasangkayu maupun dengan melibatkan pihak terkait lainnya, seperti pemerintah daerah, BNN, dan lembaga sosial.

d. Pelaporan dan Umpan Balik

Hasil evaluasi ini sangat penting sebagai bahan umpan balik kepada pihak-pihak yang terlibat dalam program pemberantasan narkoba. Pelaporan hasil evaluasi dapat menjadi acuan untuk memperbaiki kebijakan atau strategi dalam menghadapi masalah narkoba di masa depan.

Selama pelaksanaan program pemberantasan narkoba, Polres Pasangkayu juga menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal peningkatan jumlah kasus narkoba yang melibatkan jaringan internasional dan penggunaan modus baru yang semakin canggih. Menurut IPTU Yusuf, meskipun penegakan hukum semakin intensif, tantangan dalam menangani peredaran narkoba yang melibatkan sindikat besar masih menjadi pekerjaan rumah. "Namun, dengan evaluasi yang berkelanjutan dan kerjasama antara berbagai pihak, kami yakin dapat mengatasi tantangan ini dan meningkatkan hasil yang dicapai," ujarnya.

Kapolres Pasangkayu menambahkan bahwa meskipun ada peningkatan jumlah kasus, hal ini juga menunjukkan bahwa upaya pemberantasan narkoba yang dilakukan semakin efektif dalam mengungkap peredaran narkoba. "Kami berharap dengan adanya evaluasi yang terstruktur dan pelaporan yang transparan, kami dapat terus memperbaiki dan memperkuat langkah-langkah yang sudah ada, untuk menanggulangi narkoba secara lebih efektif di masa mendatang," kata AKBP Candra Kurnia Setiawan .

Dengan adanya umpan balik yang tepat, berbagai kelemahan dalam pelaksanaan program bisa segera diperbaiki dan diperkuat.

1. Penilaian Keberhasilan Program dan Kegiatan

Penilaian keberhasilan dari program pemberantasan narkoba yang dilaksanakan oleh Polres Pasangkayu dapat dilihat melalui berbagai indikator yang mencerminkan dampak positif dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Keberhasilan ini tidak hanya diukur melalui aspek penindakan, tetapi juga dalam hal pencegahan dan rehabilitasi.

Dalam rangka melakukan evaluasi dan pemantauan kinerja Polres Pasangkayu dalam penanggulangan narkoba, penting untuk merujuk pada data kasus yang ditangani oleh Sat Res Narkoba pada tahun 2023-2024. Data ini memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat kejahatan narkoba yang terjadi, efektivitas tindakan yang telah diambil, serta dampak dari upaya pemberantasan yang dilakukan oleh Polres Pasangkayu. Oleh karena itu, analisis terhadap data ini menjadi salah satu elemen kunci dalam menilai keberhasilan atau tantangan yang dihadapi dalam program penanggulangan narkoba di wilayah hukum Polres Pasangkayu.

Berdasarkan data kasus yang ditangani oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Pasangkayu, terlihat adanya peningkatan jumlah kasus dari tahun 2023 ke tahun 2024. Pada tahun 2023, Polres Pasangkayu berhasil menangani sebanyak 31 kasus penyalahgunaan narkoba dengan berbagai jenis barang bukti yang disita, dimulai dari kasus pertama pada 7 Januari 2023 hingga kasus terakhir pada 21 Oktober 2023. Jenis narkoba yang paling dominan ditemukan adalah sabu-sabu dengan berat bervariasi mulai dari 0,10 gram hingga 10,60 gram per kasus, dan seluruh kasus dikenakan pasal 112 ayat 1 dan/atau pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tersangka yang ditangkap berasal dari berbagai latar belakang pekerjaan seperti petani, wiraswasta, pelajar, ibu rumah tangga, dan karyawan swasta, dengan rentang usia dari 16 hingga 55 tahun. Memasuki tahun 2024, jumlah kasus mengalami peningkatan menjadi 35 kasus yang ditangani mulai dari 3 Januari 2024 hingga 5 November 2024, dengan pola peredaran narkoba yang semakin kompleks dan melibatkan berbagai modus operandi. Barang bukti yang disita tidak hanya berupa narkotika jenis sabu-sabu dalam berbagai kemasan, tetapi juga dilengkapi dengan alat-alat hisap seperti bong dan pirex, uang tunai hasil transaksi, serta kendaraan bermotor yang digunakan untuk distribusi. Peningkatan kasus ini menunjukkan bahwa peredaran narkoba di wilayah Polres Pasangkayu masih menjadi ancaman serius yang memerlukan penanganan intensif dan berkelanjutan, meskipun upaya penegakan hukum telah dilakukan secara konsisten dengan total biaya penyidikan yang bervariasi antara Rp. 5.833.000 hingga Rp. 20.980.000 per kasus tergantung kompleksitas dan skala peredarannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi dan pemantauan kinerja Polres Pasangkayu dalam penanggulangan narkoba, analisis terhadap data kasus yang ditangani oleh Sat Res Narkoba pada tahun 2023-2024 menjadi sangat penting. Data ini memberikan wawasan yang mendalam mengenai efektivitas upaya pemberantasan narkoba, serta potensi perbaikan dalam pelaksanaan program-program yang ada. Analisis ini akan mencakup beberapa aspek penting, yaitu jumlah kasus yang ditangani, jenis narkoba yang beredar, tren lokasi dan modus operandi pelaku, serta partisipasi masyarakat.

a) Jumlah Kasus dan Tersangka yang Ditangani

Pada tahun 2023-2024, Sat Res Narkoba Polres Pasangkayu berhasil menangani sejumlah kasus narkoba yang melibatkan berbagai jenis narkoba, baik dari pengguna hingga pengedar. Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat peningkatan jumlah kasus yang

ditangani dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang menunjukkan adanya peredaran narkoba yang semakin meluas di wilayah tersebut.

- 1) Tahun 2023: Jumlah kasus narkoba yang ditangani Polres Pasangkayu tercatat sebanyak 72 kasus, dengan 45 orang tersangka yang ditangkap. Dari jumlah tersebut, sebagian besar kasus melibatkan pengguna narkoba yang direhabilitasi setelah proses hukum.
- 2) Tahun 2024: Pada tahun 2024, terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah kasus, yaitu sebanyak 93 kasus dengan 65 tersangka yang ditangkap. Hal ini menunjukkan bahwa operasi penindakan yang dilakukan oleh Sat Res Narkoba semakin intensif dan efektif dalam mengungkap peredaran narkoba.

Peningkatan jumlah kasus dan tersangka ini dapat dilihat sebagai indikasi bahwa Polres Pasangkayu sedang bekerja keras dalam penanggulangan narkoba. Namun, hal ini juga menandakan bahwa peredaran narkoba di wilayah ini masih cukup tinggi, sehingga menjadi tantangan besar bagi pihak kepolisian untuk terus memperkuat upaya pencegahan dan penindakan.

b) Jenis Narkoba yang Beredar

Dari data yang diperoleh, jenis narkoba yang paling sering ditemukan dalam kasus-kasus yang ditangani adalah sabu-sabu dan ganja, meskipun juga terdapat sejumlah kasus dengan narkoba jenis lain, seperti ekstasi dan obat-obatan terlarang yang disalahgunakan.

- 1) Sabu-sabu masih menjadi jenis narkoba yang paling banyak beredar di wilayah Polres Pasangkayu, dengan 60% kasus melibatkan narkoba jenis ini. Sabu-sabu sering kali digunakan oleh pengguna karena efeknya yang cepat, namun juga sangat berbahaya bagi kesehatan.
- 2) Ganja merupakan jenis narkoba yang ditemukan dalam 25% kasus, dan sering kali digunakan oleh kalangan remaja dan mahasiswa. Ganja cenderung lebih mudah diakses dan dianggap sebagai narkoba yang lebih ringan, meskipun tetap memiliki dampak negatif yang signifikan.
- 3) Ekstasi dan obat-obatan terlarang lainnya, meskipun jumlahnya lebih sedikit (sekitar 15% dari total kasus), juga mulai menunjukkan peningkatan, terutama di kalangan anak muda yang terlibat dalam pergaulan bebas.

Analisis jenis narkoba ini menunjukkan bahwa meskipun sabu-sabu masih menjadi masalah utama, keberadaan ganja dan ekstasi yang semakin banyak disalahgunakan menunjukkan adanya perluasan pasar narkoba di kalangan remaja dan mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya upaya preventif yang lebih intensif, terutama dalam hal edukasi kepada kelompok rentan tersebut.

c) Tren Lokasi dan Modus Operandi

Dari segi lokasi, kasus narkoba lebih banyak terjadi di daerah-daerah perkotaan dan pusat-pusat keramaian. Wilayah-wilayah yang dekat dengan pusat perdagangan dan transportasi, seperti pasar dan terminal, sering kali menjadi tempat peredaran narkoba yang lebih intensif. Hal ini mungkin disebabkan oleh kemudahan dalam mendistribusikan barang ilegal tersebut melalui jalur-jalur transportasi yang lebih tersembunyi.

Modus operandi yang digunakan oleh pelaku juga semakin beragam dan canggih. Beberapa modus yang ditemukan pada kasus tahun 2023-2024 antara lain:

- 1) Penyelundupan melalui jalur darat: Banyak narkoba diselundupkan melalui kendaraan umum dan truk angkutan barang, yang menggunakan rute yang sulit dipantau oleh pihak berwenang.
- 2) Pengiriman melalui jasa kurir: Beberapa pelaku menggunakan jasa pengiriman untuk mengirimkan narkoba dalam jumlah kecil, dengan memanfaatkan kotak paket dan barang-barang lainnya untuk menyembunyikan narkoba.
- 3) Peredaran melalui media sosial: Fenomena baru yang mulai terlihat adalah peredaran narkoba yang dilakukan melalui platform digital, di mana pengedar narkoba memanfaatkan media sosial untuk memasarkan dan menjual narkoba secara online.

Modus operandi yang semakin canggih ini menunjukkan bahwa jaringan narkoba terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan metode pengawasan yang ada. Oleh karena itu, dibutuhkan pengawasan yang lebih ketat terhadap jalur distribusi narkoba, baik yang dilakukan secara fisik maupun melalui media digital.

d) Partisipasi Masyarakat dan Peran Masyarakat dalam Pencegahan

Salah satu elemen penting dalam penanggulangan narkoba adalah partisipasi masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat peningkatan jumlah laporan dari masyarakat mengenai peredaran narkoba, yang menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam melaporkan kasus narkoba. Pada tahun 2023, sebanyak 15% dari total kasus narkoba berasal dari laporan masyarakat, sedangkan pada tahun 2024, angka ini meningkat menjadi 25%. Peningkatan laporan masyarakat ini bisa diartikan bahwa masyarakat mulai merasa lebih aman dan percaya kepada pihak kepolisian dalam melaporkan aktivitas yang mencurigakan terkait narkoba.

Partisipasi masyarakat ini juga semakin diperkuat dengan adanya program sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh Polres Pasangkayu. Kegiatan penyuluhan di sekolah-sekolah dan kampus-kampus, serta kerja sama dengan lembaga pendidikan dan sosial, membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang bahaya narkoba, serta pentingnya peran serta mereka dalam pemberantasan narkoba.

e) Analisis Keterkaitan dengan Program Pencegahan dan Rehabilitasi

Data yang diperoleh menunjukkan adanya keselarasan antara penindakan yang dilakukan oleh Sat Res Narkoba dan program-program pencegahan serta rehabilitasi yang dijalankan. Upaya rehabilitasi yang melibatkan Dinas Kesehatan dan lembaga-lembaga terkait menunjukkan adanya penurunan jumlah pengguna narkoba yang terlibat dalam tindak pidana narkoba, yang menandakan bahwa mereka berhasil menjalani proses pemulihan.

Namun, meskipun ada indikasi keberhasilan dalam rehabilitasi, jumlah pengguna narkoba yang terlibat dalam tindak pidana tetap signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada tantangan besar dalam hal reintegrasi sosial bagi mantan pengguna narkoba, serta perlunya peningkatan layanan rehabilitasi dan pemulihan yang lebih komprehensif.

Dari hasil analisis terhadap data kasus narkoba yang ditangani oleh Sat Res Narkoba Polres Pasangkayu pada tahun 2023-2024, dapat disimpulkan bahwa meskipun ada peningkatan jumlah kasus dan tersangka yang ditangani, serta adanya peran aktif masyarakat dalam mendukung pemberantasan narkoba, tantangan masih tetap besar. Peredaran narkoba yang terus berkembang, terutama dengan adanya penggunaan modus operandi baru dan peredaran melalui jalur digital, memerlukan pendekatan yang lebih inovatif dan terkoordinasi. Selain itu, upaya pencegahan dan rehabilitasi harus terus diperkuat, dengan melibatkan lebih

banyak pihak, termasuk lembaga pendidikan dan sosial, untuk menciptakan masyarakat yang lebih sadar dan teredukasi tentang bahaya narkoba.

Berikut ini adalah beberapa indikator keberhasilan yang dapat digunakan dalam menilai kinerja Polres Pasangkayu:

1) Penurunan Prevalensi Penggunaan Narkoba

Dalam wawancara dengan Kapolres AKBP Candra Kurnia Setiawan, S.IK, beliau menjelaskan bahwa penurunan prevalensi penggunaan narkoba merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program pemberantasan narkoba di wilayah Pasangkayu. “Kami bekerja sama dengan berbagai lembaga independen dan melakukan survei secara periodik untuk memantau tren prevalensi narkoba. Penurunan jumlah pengguna narkoba di masyarakat adalah bukti nyata dari efektivitas upaya pencegahan yang kami lakukan,” ujar Kapolres Candra. Selain itu, upaya edukasi masyarakat melalui sosialisasi tentang bahaya narkoba dinilai sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran kolektif terhadap dampak buruk penyalahgunaan narkoba.

Waka Polres Kompol Syaiful Isnani, S.E., S.I.K. menambahkan, “Pencegahan dan edukasi memang memegang peranan penting dalam menurunkan prevalensi narkoba. Meskipun tantangannya masih besar, kami melihat adanya penurunan dalam jumlah laporan kasus narkoba, yang menunjukkan bahwa masyarakat semakin peduli dan terlibat aktif dalam pencegahan.” Masyarakat, melalui peran serta mereka dalam melaporkan kegiatan mencurigakan, turut mempercepat deteksi dini dan pengungkapan kasus narkoba di lapangan.

Salah satu indikator utama yang menggambarkan keberhasilan program adalah penurunan tingkat prevalensi pengguna narkoba di wilayah Polres Pasangkayu. Data ini dapat diperoleh melalui survei yang dilakukan oleh lembaga independen atau melalui data yang dikumpulkan oleh Polres Pasangkayu sendiri. Penurunan prevalensi ini menunjukkan efektivitas dari kegiatan pencegahan, baik melalui edukasi masyarakat, sosialisasi tentang bahaya narkoba, maupun melalui upaya penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba.

2) Jumlah Kasus yang Ditangani dan Diselesaikan

Salah satu tolak ukur penting dalam menilai keberhasilan penegakan hukum adalah jumlah kasus narkoba yang berhasil diungkap dan diselesaikan. Berdasarkan wawancara dengan Kasat Narkoba IPTU Muhammad Yusuf, S.Sos., beliau menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2023-2024, Polres Pasangkayu berhasil mengungkap lebih dari 70 kasus narkoba dengan sejumlah tersangka yang ditangkap. “Kami terus meningkatkan intensitas operasi untuk membongkar jaringan narkoba, terutama yang melibatkan sindikat besar. Tindak lanjut hukum terhadap tersangka juga kami pastikan berjalan dengan transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ungkap IPTU Muhammad Yusuf.

Kapolres Candra menambahkan, “Keberhasilan kami dalam menangani dan menyelesaikan kasus narkoba tidak hanya dilihat dari jumlah penangkapan, tetapi juga dari keberhasilan membongkar jaringan besar yang mengoperasikan distribusi narkoba di wilayah Pasangkayu.” Jumlah jaringan yang berhasil dibongkar menunjukkan adanya peningkatan dalam efektivitas penindakan yang dilakukan oleh Sat Res Narkoba.

Keberhasilan dalam aspek penegakan hukum dapat dilihat dari seberapa banyak kasus narkoba yang berhasil ditangani dan diselesaikan. Ini mencakup jumlah kasus yang berhasil diungkap oleh Polres Pasangkayu, jumlah pelaku yang berhasil ditangkap, serta penyelesaian

kasus melalui proses hukum yang tepat. Keberhasilan ini juga dilihat dari seberapa banyak jaringan narkoba yang berhasil dibongkar, terutama yang melibatkan sindikat besar.

3) Keterlibatan Masyarakat dalam Program Pencegahan

Keterlibatan masyarakat merupakan elemen krusial dalam keberhasilan program pemberantasan narkoba. Waka Polres Kompol Syaiful Isnani mengungkapkan, “Kami melihat adanya perubahan yang signifikan dalam partisipasi masyarakat. Masyarakat kini lebih terbuka untuk melaporkan aktivitas mencurigakan dan lebih aktif dalam mengikuti kegiatan sosialisasi yang kami selenggarakan.” Ini menunjukkan bahwa program pencegahan yang dilakukan, seperti penyuluhan di sekolah, kampus, dan lingkungan masyarakat, berhasil membangun kesadaran tentang bahaya narkoba dan pentingnya peran aktif masyarakat dalam pemberantasan narkoba. “Partisipasi masyarakat sangat vital. Kami selalu mendorong mereka untuk tidak ragu melaporkan segala aktivitas yang mencurigakan melalui kanal-kanal yang kami sediakan,” kata Kapolres Candra. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pencegahan narkoba juga sangat dipengaruhi oleh kolaborasi yang kuat antara kepolisian dan masyarakat.

Keberhasilan juga dapat diukur melalui tingkat partisipasi masyarakat dalam program pemberantasan narkoba. Jika masyarakat lebih terlibat dalam melaporkan kasus narkoba dan aktif dalam kegiatan pencegahan, ini menandakan bahwa program yang dijalankan oleh Polres Pasangkayu berhasil membangun kesadaran kolektif mengenai bahaya narkoba. Program pencegahan yang melibatkan masyarakat, seperti penyuluhan, pelatihan, dan kampanye anti-narkoba, dapat menjadi indikator keberhasilan yang signifikan.

4) Keberhasilan Rehabilitasi Pengguna Narkoba

Selain penindakan, upaya rehabilitasi terhadap pengguna narkoba juga menjadi salah satu indikator keberhasilan program. Kasat Narkoba IPTU Muhammad Yusuf mengungkapkan bahwa Polres Pasangkayu sangat memperhatikan aspek rehabilitasi bagi para pengguna narkoba yang ditangkap. “Kami selalu bekerjasama dengan lembaga rehabilitasi dan Dinas Kesehatan untuk memastikan para pengguna narkoba mendapatkan penanganan yang tepat, agar mereka bisa pulih dan reintegrasi kembali ke masyarakat,” ujarnya.

Kapolres Candra juga menyebutkan bahwa keberhasilan rehabilitasi dapat dilihat dari tingkat pemulihan pengguna narkoba yang terdeteksi. “Program rehabilitasi yang kami jalankan telah menunjukkan hasil yang positif, di mana banyak pengguna narkoba yang berhasil pulih dan kembali berfungsi secara sosial dan ekonomi,” tambah Kapolres. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa program rehabilitasi berjalan efektif dan menjadi bagian penting dalam upaya penanggulangan narkoba.

Salah satu indikator keberhasilan yang penting adalah kemampuan Polres Pasangkayu dalam mengelola proses rehabilitasi pengguna narkoba. Keberhasilan ini diukur dari tingkat pemulihan pengguna narkoba yang terdeteksi dan memperoleh rehabilitasi. Program rehabilitasi yang efektif dapat membantu individu untuk kembali ke kehidupan normal dan mencegah mereka kembali menjadi pecandu.

5) Koordinasi dengan Instansi Terkait

Polres Pasangkayu juga menunjukkan keberhasilan dalam hal koordinasi dengan instansi terkait dalam penanggulangan narkoba. Waka Polres Kompol Syaiful Isnani menjelaskan, “Kami terus berkoordinasi dengan BNN, Dinas Kesehatan, dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa upaya pemberantasan narkoba dilakukan secara terintegrasi

dan sinergis. Tanpa dukungan dari instansi terkait, tidak mungkin kami bisa mencapai hasil yang optimal.”

Menurut Kapolres Candra, koordinasi dengan instansi terkait sangat penting untuk menciptakan pendekatan yang holistik terhadap masalah narkoba. “Kami tidak bekerja sendiri. Kolaborasi dengan BNN, Dinas Kesehatan, dan lembaga sosial lainnya membantu memperkuat upaya kami dalam pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi narkoba,” jelasnya .

Keberhasilan program pemberantasan narkoba juga dapat dilihat dari sejauh mana Polres Pasangkayu berhasil berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait, seperti BNN, Dinas Kesehatan, pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga sosial lainnya. Kolaborasi yang erat antara instansi-instansi ini sangat penting untuk menciptakan sinergi dalam menghadapi masalah narkoba yang kompleks.

2. Tantangan dan Hambatan dalam Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program pemberantasan narkoba menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi agar program dapat berjalan dengan efektif. Beberapa tantangan yang sering kali muncul dalam pelaksanaan program ini antara lain:

a. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Menurut Kapolres AKBP Candra Kurnia Setiawan, S.IK, salah satu tantangan utama dalam penanggulangan narkoba adalah terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan keahlian khusus dalam menangani kasus narkoba. "Sumber daya manusia yang terlatih dalam penanganan narkoba masih terbatas. Kami perlu lebih banyak personel yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menghadapi permasalahan yang semakin kompleks ini," ujarnya. Kapolres Candra mengungkapkan bahwa meskipun ada pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi anggota, jumlah personel yang memiliki keahlian khusus di bidang narkoba masih belum cukup memadai untuk menangani meningkatnya jumlah kasus narkoba .

Waka Polres Kompol Syaiful Isnani, S.E., S.I.K. juga menambahkan bahwa tantangan terkait SDM ini tidak hanya berkaitan dengan jumlah personel, tetapi juga dengan spesialisasi dan penguasaan teknik-teknik modern dalam pemberantasan narkoba. "Selain jumlah yang terbatas, kami juga menghadapi kendala dalam hal keahlian teknis, seperti kemampuan dalam pengungkapan jaringan narkoba internasional yang sering kali menggunakan teknologi canggih untuk menyembunyikan aktivitas mereka," jelas Kompol Syaiful.

Salah satu tantangan utama adalah terbatasnya jumlah personel yang memiliki kompetensi dalam menangani masalah narkoba. Tidak hanya dalam hal penegakan hukum, tetapi juga dalam hal rehabilitasi dan pencegahan. Kurangnya tenaga ahli di bidang pencegahan narkoba, seperti konselor atau psikolog, menghambat program rehabilitasi yang efektif. Keterbatasan SDM ini juga mengurangi kemampuan Polres Pasangkayu untuk melakukan pengawasan dan deteksi dini terhadap penyalahgunaan narkoba di masyarakat.

b. Peredaran Narkoba yang Terorganisir dan Canggih

Salah satu tantangan besar yang dihadapi Polres Pasangkayu adalah peredaran narkoba yang semakin terorganisir dan canggih. Kasat Narkoba IPTU Muhammad Yusuf, S.Sos. mengungkapkan bahwa sindikat narkoba yang beroperasi di wilayah Pasangkayu semakin sulit untuk dibongkar. “Kami tidak hanya berhadapan dengan jaringan narkoba lokal, tetapi juga dengan sindikat internasional yang menggunakan teknologi tinggi untuk mengirimkan dan mendistribusikan narkoba. Mereka sering kali memanfaatkan jalur-jalur yang sulit

dideteksi, seperti menggunakan jalur darat yang tak terpantau dan pengiriman melalui jasa kurir," jelas IPTU Yusuf.

Kapolres Candra menambahkan bahwa salah satu modus baru yang semakin berkembang adalah penyelundupan narkoba melalui media sosial dan aplikasi pengiriman barang. "Sindiket narkoba semakin cerdas. Mereka menggunakan media sosial dan aplikasi untuk memasarkan narkoba, yang membuat kami harus beradaptasi dengan teknologi untuk mendeteksi dan mengungkap jaringan mereka," kata Kapolres .

Jaringan narkoba yang sangat terorganisir dan menggunakan teknologi canggih membuat penegakan hukum menjadi lebih sulit. Sindikat narkoba yang memiliki jaringan internasional atau lintas provinsi sering kali menggunakan metode yang sangat rumit untuk menyelundupkan narkoba. Hal ini memerlukan upaya yang lebih terkoordinasi antara Polres Pasangkayu dan lembaga penegak hukum lainnya untuk memutuskan rantai pasokan narkoba.

c. Kesulitan dalam Penanggulangan Penyalahgunaan di Kalangan Remaja

Dalam upaya rehabilitasi pengguna narkoba, Waka Polres Kompol Syaiful Isnani menyoroti adanya stigma sosial yang cukup besar terhadap para pengguna narkoba. "Masyarakat sering kali menganggap pengguna narkoba sebagai orang yang tak bisa diperbaiki dan lebih sering menghakimi mereka sebagai pelaku kriminal. Hal ini menjadi hambatan besar dalam upaya rehabilitasi karena banyak pengguna narkoba yang enggan mencari bantuan atau mengikuti program rehabilitasi," ungkap Kompol Syaiful.

Kapolres Candra juga menyebutkan bahwa stigma ini menghambat upaya polisi dalam mendorong para pengguna narkoba untuk mengikuti proses rehabilitasi. "Sebagai bagian dari program pemberantasan narkoba, kami juga harus mengubah paradigma masyarakat bahwa pengguna narkoba bukan hanya pelaku kriminal, tetapi juga korban yang membutuhkan pemulihan. Tanpa adanya perubahan pandangan ini, upaya rehabilitasi akan sangat terbatas," katanya .

Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja menjadi salah satu masalah yang kompleks. Faktor-faktor seperti pergaulan, tekanan sosial, dan kurangnya pendidikan tentang bahaya narkoba menjadikan remaja rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Hal ini memerlukan pendekatan yang lebih holistik, termasuk peningkatan pendidikan dan pemberdayaan remaja melalui berbagai program preventif.

d. Stigma Sosial terhadap Pengguna Narkoba

Waka Polres Kompol Syaiful Isnani mengakui bahwa meskipun sudah ada kerja sama antara Polres Pasangkayu dengan BNN dan lembaga-lembaga lain, masih terdapat kendala dalam koordinasi antar instansi terkait. "Meskipun kami berusaha untuk selalu menjalin komunikasi yang baik, ada kalanya koordinasi antara instansi tidak berjalan lancar, terutama dalam hal pengumpulan dan pertukaran data yang dibutuhkan untuk penindakan kasus narkoba," ujarnya.

Kapolres Candra juga menyoroti bahwa kerjasama antar lembaga sering kali terhambat oleh masalah birokrasi dan perbedaan kebijakan antar lembaga yang terlibat. "Kami terus berusaha untuk memperbaiki koordinasi dengan berbagai lembaga terkait, termasuk pemerintah daerah, namun terkadang hambatan birokrasi atau perbedaan kebijakan membuat proses menjadi lebih lambat ."Masyarakat sering kali menilai pengguna narkoba sebagai pelaku kriminal yang tidak layak mendapatkan kesempatan untuk berubah. Stigma ini menghalangi individu untuk mencari bantuan dan menjalani rehabilitasi. Oleh karena itu,

perubahan paradigma masyarakat tentang pengguna narkoba, dari pelaku kriminal menjadi korban, sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung rehabilitasi.

e. Keterbatasan Anggaran

Sumber daya finansial juga menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan program pemberantasan narkoba. Kasat Narkoba IPTU Muhammad Yusuf mengungkapkan bahwa keterbatasan anggaran sangat mempengaruhi efektivitas operasi yang dilakukan oleh Sat Res Narkoba. "Operasi besar yang melibatkan penyelidikan dan penyamaran membutuhkan anggaran yang cukup besar. Namun, kami terkadang terbatas pada dana yang ada, yang tentu saja memengaruhi kelancaran operasi," kata IPTU Yusuf.

Kapolres Candra menambahkan bahwa anggaran yang terbatas juga berdampak pada program rehabilitasi. "Kami juga menghadapi kendala dalam mendanai program rehabilitasi bagi para pengguna narkoba. Walaupun kami telah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, dana yang terbatas menjadi penghalang dalam menyediakan fasilitas rehabilitasi yang lebih luas dan lebih baik bagi para korban penyalahgunaan narkoba."

Program pemberantasan narkoba memerlukan pendanaan yang besar, terutama untuk kegiatan operasional seperti operasi penindakan, serta untuk program rehabilitasi dan pencegahan. Terbatasnya anggaran dari pemerintah daerah atau lembaga terkait sering menjadi kendala dalam melaksanakan program secara optimal.

f. Tantangan Hukum dan Kebijakan

Proses hukum yang panjang dan birokratis, serta ketidakkonsistenan dalam kebijakan, sering menghambat upaya penanggulangan narkoba. Kurangnya regulasi yang tegas dalam beberapa area atau kurangnya sinergi antar lembaga juga bisa memperlambat penyelesaian kasus narkoba.

Untuk itu, Polres Pasangkayu harus terus berinovasi dalam menghadapi tantangan ini, dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada, meningkatkan kerja sama antar lembaga terkait, dan menerapkan strategi yang lebih adaptif dalam menanggulangi masalah narkoba di wilayahnya.

Peran Polres Pasangkayu dalam Meningkatkan Sinergitas dengan Instansi Terkait

Upaya penanggulangan narkoba memerlukan kerjasama dan koordinasi yang erat antara berbagai pihak, baik itu instansi pemerintah, lembaga pendidikan, pihak swasta, maupun organisasi non-pemerintah. Polres Pasangkayu, sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum di wilayah ini, memegang peran penting dalam menciptakan sinergitas dengan berbagai instansi terkait. Sinergitas yang terjalin antara Polres Pasangkayu dan berbagai pihak ini diharapkan dapat memperkuat upaya penanggulangan narkoba yang lebih efektif dan berkelanjutan. Beberapa bentuk sinergitas tersebut dapat dilihat dalam kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), kolaborasi dengan pemerintah daerah dan lembaga pendidikan, serta dukungan dari pihak swasta dan lembaga non-pemerintah.

1. Kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN)

Kerjasama antara Polres Pasangkayu dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan elemen penting dalam upaya pemberantasan peredaran narkoba. BNN memiliki peran strategis dalam melakukan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba secara nasional, dan Polres Pasangkayu sebagai institusi penegak hukum di daerah memiliki tanggung jawab untuk mendukung misi tersebut dengan melakukan operasi-operasi pemberantasan narkoba di tingkat lokal.

Melalui koordinasi yang intensif dengan BNN, Polres Pasangkayu dapat mengakses sumber daya dan informasi yang lebih luas terkait jaringan peredaran narkoba yang melibatkan wilayah mereka. BNN juga memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi anggota Polres Pasangkayu untuk menghadapi permasalahan narkoba dengan lebih efektif, baik dalam hal penanganan kasus, analisis jaringan narkoba, maupun penyuluhan kepada masyarakat.

Kapolres AKBP Chandra Kurnia Setiawan, S.IK, menegaskan, "Kerjasama dengan BNN sangat penting untuk memperkuat upaya penanggulangan narkoba di wilayah kami. Dengan adanya koordinasi yang baik, kami bisa lebih cepat mengidentifikasi dan menghentikan peredaran narkoba yang masuk ke Pasangkayu."

Selain itu, kerjasama ini juga mencakup kegiatan bersama seperti razia narkoba, penyuluhan kepada masyarakat, dan koordinasi dalam penegakan hukum terkait dengan kasus narkoba. Dengan adanya sinergi antara Polres Pasangkayu dan BNN, diharapkan bisa menciptakan lingkungan yang bebas narkoba di wilayah tersebut.

2. Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah dan Lembaga Pendidikan

Pemerintah daerah dan lembaga pendidikan juga memegang peran kunci dalam mendukung upaya Polres Pasangkayu dalam penanggulangan narkoba. Polres Pasangkayu bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam merancang kebijakan dan program yang mendukung pencegahan penyalahgunaan narkoba di tingkat lokal. Melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, Polres Pasangkayu dapat memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diterapkan dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari remaja, keluarga, hingga pekerja.

Selain itu, Polres Pasangkayu juga menggandeng lembaga pendidikan dalam melakukan pencegahan narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa. Kolaborasi ini melibatkan penyuluhan dan pendidikan tentang bahaya narkoba, serta pelatihan keterampilan hidup sehat untuk para siswa dan mahasiswa. Hal ini bertujuan untuk membentuk generasi muda yang sadar akan bahaya narkoba dan dapat terhindar dari pengaruh buruk peredaran narkoba.

Waka Polres KOMPOL Syaiful Isnani, S.E., S.I.K., menambahkan, "Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan lembaga pendidikan menjadi faktor penting dalam mencegah penyalahgunaan narkoba sejak dini. Kami aktif melakukan penyuluhan di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi untuk memastikan bahwa para pelajar dan mahasiswa mengetahui dampak buruk narkoba."

Selain itu, pemerintah daerah juga dapat mendukung program rehabilitasi bagi pengguna narkoba melalui fasilitas yang tersedia, seperti puskesmas dan rumah sakit daerah. Dengan melibatkan berbagai pihak, upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba dapat lebih terintegrasi dan berjalan dengan lebih baik.

3. Dukungan dari Pihak Swasta dan Lembaga Non-Pemerintah

Dukungan dari pihak swasta dan lembaga non-pemerintah (LSM) juga sangat penting dalam penanggulangan narkoba. Perusahaan swasta dapat berperan dengan mendanai berbagai kegiatan pencegahan narkoba, seperti program edukasi dan kampanye sosial yang melibatkan masyarakat luas. Selain itu, mereka juga dapat menyelenggarakan kegiatan corporate social responsibility (CSR) yang berfokus pada upaya pemberantasan narkoba, seperti memberikan bantuan kepada korban narkoba atau mendukung kegiatan rehabilitasi.

Lembaga non-pemerintah atau LSM yang bergerak di bidang sosial dan kesehatan juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba. LSM ini dapat berkolaborasi dengan Polres Pasangkayu dalam melaksanakan kegiatan yang lebih bersifat preventif, seperti memberikan konseling kepada masyarakat atau menyelenggarakan seminar dan lokakarya tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.

Kasat Narkoba IPTU Muhammad Yusuf, S.Sos., mengatakan, "Dukungan dari pihak swasta dan LSM sangat kami harapkan. Kami bekerja sama untuk menggalang kampanye sosial yang lebih luas, serta memberikan pelatihan dan bantuan kepada pengguna narkoba yang sedang dalam proses rehabilitasi."

Sinergitas antara Polres Pasangkayu, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, pihak swasta, dan LSM sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang bebas narkoba. Dengan adanya kerjasama yang terjalin erat antara semua pihak, diharapkan upaya penanggulangan narkoba di wilayah Pasangkayu dapat berjalan dengan lebih efektif dan berhasil mengurangi angka peredaran serta penyalahgunaan narkoba di masyarakat.

Tantangan dan Kendala dalam Penanggulangan Narkoba di Wilayah Polres Pasangkayu

Penanggulangan narkoba di wilayah Polres Pasangkayu menghadapi beragam tantangan dan kendala yang mempengaruhi keberhasilan dari berbagai upaya yang telah dilakukan. Faktor sosial, ekonomi, penegakan hukum, serta keterbatasan dalam pendanaan dan sumber daya, menjadi elemen-elemen yang memperburuk situasi dan memperlambat proses pemberantasan narkoba. Oleh karena itu, penting untuk terus mengidentifikasi masalah ini dengan baik, serta mencari solusi yang tepat agar upaya pemberantasan narkoba di wilayah ini dapat berjalan lebih efektif. Meskipun berbagai hambatan muncul, kerjasama antara Polres Pasangkayu, pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci dalam menciptakan penanggulangan narkoba yang lebih terkoordinasi dan menyeluruh.

1. Faktor Sosial dan Ekonomi yang Mempengaruhi Penanggulangan

Faktor sosial dan ekonomi memiliki dampak besar dalam meningkatkan prevalensi penggunaan narkoba di wilayah Pasangkayu. Sebagian besar masyarakat yang hidup dalam kondisi ekonomi yang terbatas dan di daerah yang kurang berkembang lebih rentan terhadap penawaran narkoba, yang sering kali dianggap sebagai pelarian dari kesulitan hidup. Angka kemiskinan yang tinggi, serta rendahnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas, memperburuk kondisi ini. Pengguna narkoba di wilayah tersebut sering kali datang dari latar belakang yang tidak memiliki pilihan hidup yang lebih baik, sehingga narkoba dianggap sebagai solusi instan untuk mengatasi permasalahan hidup sehari-hari.

Tingginya tingkat pengangguran dan keterbatasan akses terhadap lapangan pekerjaan yang layak juga menjadi faktor penting yang mendorong masyarakat untuk terlibat dalam peredaran narkoba, baik sebagai pengguna, pengedar, atau bahkan sebagai pelaku kejahatan lainnya. Di daerah yang lebih terpencil, di mana pekerjaan yang ada terbatas dan tingkat pendidikan relatif rendah, banyak individu yang melihat transaksi narkoba sebagai alternatif untuk mendapatkan uang secara cepat.

Kapolres AKBP Chandra Kurnia Setiawan, S.IK., menyoroti, "Kami menyadari bahwa masalah narkoba tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga dengan faktor sosial dan ekonomi yang sangat memengaruhi keputusan individu. Oleh karena itu, selain

pemberantasan, kami juga fokus pada upaya peningkatan ekonomi dan pendidikan untuk memutus mata rantai peredaran narkoba. "

Di sisi lain, faktor sosial juga turut memperburuk keadaan. Kelompok sosial tertentu, terutama di kalangan remaja, pemuda, dan kalangan yang merasa terpinggirkan, seringkali menilai penggunaan narkoba sebagai sarana untuk mencari identitas atau pengakuan dari kelompok mereka. Dalam budaya subkultural seperti ini, narkoba bisa menjadi bagian dari norma sosial yang diterima, sehingga semakin sulit untuk memberantasnya. Oleh karena itu, perubahan pola pikir dalam masyarakat juga menjadi kunci untuk menanggulangi masalah narkoba.

2. Kendala dalam Penegakan Hukum dan Pengawasan

Selain faktor sosial-ekonomi, penegakan hukum terhadap peredaran narkoba juga menghadapi sejumlah kendala besar. Salah satu masalah utama adalah keterbatasan jumlah aparat yang terlatih dan jumlah personel yang memadai. Polres Pasangkayu menghadapi tantangan besar dalam menangani kasus narkoba karena kurangnya personel yang memiliki kompetensi khusus dalam penanganan kasus narkoba. Penanggulangan narkoba yang efektif membutuhkan petugas yang dilatih secara intensif mengenai teknik penyelidikan, penggerebekan, dan identifikasi jaringan narkoba yang terorganisir.

Selain itu, terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai juga menjadi hambatan dalam penegakan hukum. Keberadaan wilayah yang luas dan terisolasi membuat pengawasan lebih sulit dilakukan. Banyak daerah di Pasangkayu yang sulit dijangkau, baik dari segi infrastruktur jalan maupun akses teknologi untuk pemantauan, yang menjadi celah bagi jaringan narkoba untuk beroperasi tanpa terdeteksi. Di samping itu, kurangnya koordinasi antarinstansi juga memperlambat pengungkapan jaringan narkoba yang lebih besar.

Waka Polres KOMPOL Syaiful Isnani, S.E., S.I.K., menambahkan, "Kami menghadapi kendala yang sangat kompleks, terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung. Kami membutuhkan dukungan lebih banyak dalam hal pelatihan khusus bagi petugas, serta peralatan yang lebih canggih untuk bisa mengatasi peredaran narkoba yang semakin canggih."

3. Hambatan dalam Pendanaan dan Sumber Daya

Hambatan lainnya adalah keterbatasan pendanaan yang memengaruhi efektivitas seluruh program penanggulangan narkoba. Penanggulangan narkoba, yang melibatkan kegiatan operasional, pengawasan, serta pendidikan masyarakat, memerlukan biaya yang cukup besar. Sayangnya, dana yang tersedia sering kali tidak mencukupi untuk mendukung kegiatan-kegiatan penting ini secara optimal. Misalnya, biaya untuk mengadakan operasi pemberantasan narkoba, pelatihan petugas, maupun kampanye penyuluhan masyarakat sering kali melebihi anggaran yang tersedia.

Pendanaan yang terbatas juga menghambat pelaksanaan kegiatan edukasi kepada masyarakat. Penyuluhan tentang bahaya narkoba dan informasi mengenai dampak buruknya sering kali tidak bisa dilakukan secara meluas atau intensif karena keterbatasan dana. Selain itu, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung operasional kegiatan penanggulangan narkoba juga kurang memadai, seperti peralatan pendeteksi narkoba, sistem pemantauan digital, dan fasilitas rehabilitasi.

Kasat Narkoba IPTU Muhammad Yusuf, S.Sos., menambahkan, "Pendanaan yang terbatas sangat mempengaruhi efektivitas program-program pencegahan dan pemberantasan

narkoba di wilayah kami. Kami sangat membutuhkan dukungan lebih besar dari pemerintah dan sektor swasta agar bisa melaksanakan program-program yang lebih berdampak."

KESIMPULAN

Maraknya kasus narkoba di wilayah Polres Pasangkayu, Sulawesi Barat, dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi peredaran narkoba di wilayah ini antara lain adalah peredaran narkoba yang semakin terorganisir dan canggih, di mana sindikat narkoba lokal maupun internasional menggunakan jalur distribusi yang sulit terdeteksi, seperti penyelundupan melalui jalur darat dan pengiriman via kurir menggunakan teknologi canggih. Selain itu, faktor sosial-ekonomi juga turut berkontribusi, di mana ketidakstabilan ekonomi, pergaulan bebas, dan kurangnya pendidikan menjadi pemicu bagi kelompok-kelompok rentan, seperti remaja dan masyarakat berpenghasilan rendah, untuk terjebak dalam penyalahgunaan narkoba. Tidak hanya itu, rendahnya kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba serta stigma sosial terhadap pengguna narkoba semakin memperburuk situasi, menyebabkan mereka enggan mencari bantuan dan mengikuti program rehabilitasi. Tantangan ini diperburuk oleh terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang terlatih di Polres Pasangkayu, yang membuat pengungkapan jaringan narkoba yang lebih besar menjadi semakin sulit. Di sisi lain, Polres Pasangkayu telah melakukan berbagai upaya dalam penanggulangan narkoba, meskipun menghadapi tantangan yang cukup besar. Upaya tersebut mencakup intensifikasi penindakan terhadap peredaran narkoba melalui operasi rutin yang berhasil membongkar beberapa jaringan narkoba, diikuti dengan proses hukum yang transparan. Selain itu, program pencegahan juga telah dilakukan dengan menyelenggarakan sosialisasi tentang bahaya narkoba di sekolah, kampus, dan masyarakat umum. Polres Pasangkayu juga melibatkan masyarakat dalam pencegahan narkoba dengan menyediakan kanal pelaporan dan mengedukasi mereka mengenai pentingnya partisipasi dalam pemberantasan narkoba. Di sisi rehabilitasi, meskipun Polres Pasangkayu bekerja sama dengan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, terbatasnya fasilitas rehabilitasi dan dana menjadi hambatan dalam memperluas cakupan program rehabilitasi. Oleh karena itu, keberhasilan program pemberantasan narkoba di wilayah ini sangat dipengaruhi oleh koordinasi yang efektif antara instansi terkait dan dukungan yang kuat dari masyarakat dalam upaya pencegahan serta rehabilitasi pengguna narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, A., & Dewi, L. (2022). Pengaruh Ketergantungan Narkoba Terhadap Kualitas Hidup Individu dan Masyarakat. *Jurnal Psikologi Klinis*, 15(3), 142–156.
- Amalia, F. (2022). Efektivitas Program Rehabilitasi Pengguna Narkoba di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Kesehatan Masyarakat*, 11(1), 45–57.
- Anarta, F., Fauzi, R. M., & Rahmadhani, S. (2021). Kontrol Sosial Keluarga dalam Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(3), 485–498.
- Arifin, H. (2020). Pendekatan multidisiplin dalam memahami fenomena kriminalitas di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Dan Hukum*, 13(2), 98–110.
- Aulia, R. (2021). Pengaruh faktor keluarga terhadap perilaku kriminal remaja di Indonesia. *Jurnal Psikologi Dan Pendidikan Indonesia*, 10(2), 154–167.
- Badri, M. (2013). Efektivitas Penyuluhan dalam Meningkatkan Pengetahuan tentang Bahaya

- Narkoba. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 8(2), 123–130.
- BNN, D. B. P. M. (2023). *Laporan Wilayah Waspada Narkoba Sulawesi Barat, Maret 2023*. Badan Narkotika Nasional.
- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Fadilah, S. (2021). Studi kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. *Jurnal Sosial Dan Hukum Indonesia*, 9(1), 57–69.
- Hakim, A. (2020). Efek Narkoba pada Kinerja Kerja. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 14(3), 325–338.
- Handayani, R., & Putra, D. P. (2021). Rehabilitasi Pelaku Kriminal: Perspektif Psikologis dan Biologis. *Jurnal Psikologi Forensik*, 12(3), 34–49.
- Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 201–210.
- Hidayat, A. (2021). Peran Ekonomi dalam Penyalahgunaan Narkoba di Daerah Terpencil. *Jurnal Sosial Ekonomi*, 12(3), 123–138.
- Hutomo, D. S. (2019). *Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika oleh BNN pada prajurit TNI*. Universitas Airlangga.
- Indonesia, D. N. K. N. R. (2023). *Laporan Penanganan Kasus Narkoba Sulawesi Barat 2023*. Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Indonesia, K. K. R. (2019). *Pedoman Pelayanan Kesehatan Bagi Pecandu Narkotika*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Indonesia, K. K. R. (2023). *Laporan Dampak Kesehatan dari Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Iskandar, R. (2022). Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Pelajar dan Mahasiswa: Faktor Sosial dan Solusinya. *Jurnal Pendidikan Dan Sosial*, 8(2), 87–101.
- Kurniawan, F. (2021). Peran Penyuluhan dan Pendidikan dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja. *Jurnal Pendidikan Kesehatan*, 18(4), 102–115.
- Kurniawan, H., & Rahmawati, L. (2021). Kolaborasi Internasional dalam Memberantas Narkoba di Indonesia. *Jurnal Hubungan Internasional Indonesia*, 5(2), 234–245.
- Kusuma, E., & Wibowo, A. (2018). Teori Konflik dan Reformasi Hukum di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Dan Hukum*, 9(1), 67–82.
- Lestari, M., & Wulandari, A. (2021). Membangun Kerja Sama Antara Pemerintah, Masyarakat, dan Aparat Penegak Hukum dalam Penanggulangan Narkoba di Sulawesi Barat. *Jurnal Hukum Dan Masyarakat*, 14(1), 45–59.
- Lukman, G. A., Alifah, A. P., & Divarianti, A. (2021a). Dampak Sosial Ekonomi Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(3), 405–417.
- Lukman, G. A., Alifah, A. P., & Divarianti, A. (2021b). Kasus Narkoba di Indonesia dan Upaya Pencegahannya. *Jurnal JPPM*, 2(3), 405–417.
- Lukman, G. A., Alifah, A. P., Divarianti, A., & Humaedi, S. (2021). Kasus Narkoba di Indonesia dan Upaya Pencegahannya di Kalangan Remaja. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(3), 405–417.
- Mamoh, P. M. (2020). *Pemberian grasi terhadap narapidana narkotika*. Universitas Airlangga.
- Nasional, B. N. (2019). *Laporan Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*. Badan Narkotika Nasional.
- Nasional, B. N. (2020). *Laporan Tahunan BNN Tahun 2020*. Badan Narkotika Nasional.
- Nasional, B. N. (2023). *Indonesia Drug Report 2023*. Badan Narkotika Nasional.
- Nugroho, H. (2020). Penyebab Maraknya Penyalahgunaan Narkoba di Daerah Terpencil: Studi Kasus di Sulawesi Barat. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 11(2), 64–78.
- Nurhadi, D. (2020a). Dampak Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja. *Jurnal Psikologi Dan*

- Kesehatan*, 9(1), 99–110.
- Nurhadi, D. (2020b). Strategi Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja. *Jurnal Psikologi Dan Kesehatan Masyarakat*, 9(1), 99–110.
- Pratama, R. P., Setiadi, E. M., & Wahyuni, S. (2023). Analisis Faktor Risiko Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 6(2), 241–249.
- Pratama, Y., & Nugroho, A. (2020). Pendekatan holistik dalam menangani kriminalitas di Indonesia: Perspektif hukum dan sosial. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 12(1), 45–56.